

**KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK**

**(Studi Pada Pedagang Di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep Pasca Penutupan
Aplikasi Tiktok Shop)**

***BUSINESS LICENSING POLICY, ADVERTISING, DEVELOPMENT, AND
SUPERVISION OF BUSINESS ACTIVITIES IN TRADING THROUGH
ELECTRONIC SYSTEMS***

***(Study of Traders in Bangkal Market, Sumenep Regency After Closing of the Tiktok
Shop Application)***

Oleh :

Moh. Choirul Fajari¹, Roos Yuliastina²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Wiraraja.

E-mail: choirulf2@gmail.com

tina.fisip@wiraraja.ac.id

Abstract

In the Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance and Supervision of Business Actors in Trading via Electronic Systems, Tiktok states that it facilitates buying and selling transactions of goods in the Tiktok Shop. Social media is an instant medium with various uses. Apart from functioning as a communication tool, social media also functions as a means for its users to explore the kinds of information they need and determine the formation of reality, as well as their thoughts and views about the world and social reality in it. Social media has a functional role and various influences in people's lives, so it must be redesigned so that this kind of social media still maintains the function and purpose of social media itself, as well as presenting various aspects in the lives of each individual or group. The method used in this proposal research is a qualitative approach with a descriptive type and data collection through observation, interviews and documentation. The policy has had a significant impact on various groups of traders, especially those who depend on online platforms to sell products. Merchants who are already selling online feel the decline in sales and have to look for other alternatives, while merchants who are not yet selling online see the potential to start utilizing technology in their business. This policy also emphasizes the importance of diversification and adaptation in business strategies to deal with unexpected changes in the market

Keywords: Policy, Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023, Street Vendors

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Tiktok menyatakan tindakan memfasilitasi transaksi jual-beli barang di dalam Tiktok Shop. Media sosial merupakan salah satu media instan dengan berbagai kegunaan. Media sosial selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media sosial juga berfungsi juga menjadi sarana bagi penggunanya untuk menggali secara macam informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, serta pemikiran dan pandangannya tentang dunia dan realitas sosial di dalamnya. Media sosial memiliki fungsi peranan dan berbagai pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus didesain ulang agar media sosial semacam ini tetap mempertahankan fungsi dan tujuan dari media sosial itu sendiri, serta menghadirkan berbagai aspek dalam kehidupan setiap individu atau kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian proposal ini

adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan pada berbagai kelompok pedagang, terutama bagi mereka yang bergantung pada platform online untuk menjual produk. Pedagang yang sudah berjualan online merasakan penurunan penjualan dan harus mencari alternatif lain, sementara pedagang yang belum berjualan online melihat potensi untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya diversifikasi dan adaptasi dalam strategi bisnis untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga di pasar.

Kata Kunci: Kebijakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Pedagang Kaki Lima

1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Tiktok menyatakan tindakan memfasilitasi transaksi jual-beli barang di dalam Tiktok Shop. Dalam keterangan resmi perusahaan, Tiktok mengatakan bahwa prioritas utama perusahaan adalah menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tiktok akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana perusahaan mendatang. Hal tersebut menuai perbincangan publik yang dimana penutupan Tiktok Shop akan berdampak terhadap kelangsungan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini punya akun di Tiktok. Akan tetapi, dampak tersebut tidak akan langsung lama sebab penjual diperkirakan akan merambah ke saluran penjualan daring lainnya. Pemisahan model bisnis social commerce dan lokapasar perlu ditegakkan pemerintah ke semua perusahaan platform media social, bukan hanya kepada Tiktok (Mafulla, 2022).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Tiktok menyatakan tindakan memfasilitasi transaksi jual-beli barang di dalam Tiktok Shop. Dalam keterangan resmi perusahaan, Tiktok mengatakan bahwa prioritas utama perusahaan adalah menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang

berlaku di Indonesia. Tiktok akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana perusahaan mendatang. Hal tersebut menuai perbincangan publik yang dimana penutupan Tiktok Shop akan berdampak terhadap kelangsungan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini punya akun di Tiktok. Akan tetapi, dampak tersebut tidak akan langsung lama sebab penjual diperkirakan akan merambah ke saluran penjualan daring lainnya. Pemisahan model bisnis social commerce dan lokapasar perlu ditegakkan pemerintah ke semua perusahaan platform media social, bukan hanya kepada Tiktok (Mafulla, 2022).

Akan tetapi, di sisi lain media sosial juga memberikan dampak negatif terhadap

pedagang dalam beberapa cara. Pertama, persaingan yang intensif di platform online shop dapat membuat pedagang kecil kesulitan untuk mendapatkan perhatian dan mencapai target pasar. Kedua, komentar negatif atau ulasan buruk dapat dengan cepat menyebar, merugikan reputasi bisnis pedagang. Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau tidak akurat yang dapat merugikan bisnis. Selain itu, ketergantungan pada media sosial untuk pemasaran juga dapat menimbulkan biaya tambahan, terutama jika pedagang terlalu bergantung pada iklan berbayar.

Tiktok Shop telah menjadi platform yang populer bagi para pebisnis dan pengusaha untuk memasarkan dan menjual produk mereka secara langsung kepada para pengguna platform tersebut. Namun, platform ini juga telah menjadi subjek kontroversi dan

pengawasan hukum. Beberapa permasalahan hukum yang teridentifikasi antara lain ketidakjujuran pelaku usaha terkait produk yang dijualnya, ketidaksesuaian antara produk yang dipesan dengan yang diterima konsumen, ketidakpahaman konsumen terkait detail produk yang dibeli, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha, dan proses pengaduan pengembalian barang yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha,

Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyatakan tindakan memfasilitasi transaksi jual-beli barang di dalam Tiktok Shop (Muslim et al., 2023).

2. TINJAUAN TEORITIS

Analisa Kebijakan Publik Pengertian

Analisa Kebijakan Publik

Menurut (Abidin, 2019) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik” analisis adalah proses pemecahan atau pembedahan suatu benda atau situasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami atau menjelaskan keseluruhan. Analisis dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti analisis data, analisis keuangan, analisis sastra, analisis kebijakan, dan banyak lagi. Secara umum, analisis melibatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu subjek dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi komponen-komponennya. Kebijakan menurut Thomas Dye dikatakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Thomas R. Dye adalah seorang ahli ilmu politik yang terkenal dengan karyanya dalam bidang analisis kebijakan publik. Salah satu model analisis kebijakan publik yang dikembangkan oleh Dye adalah model analisis system yang terdiri dari:

1. Input (Masukan):

Pada tahap ini, Dye menekankan identifikasi dan pemahaman atas berbagai input yang mempengaruhi proses kebijakan publik. Input ini dapat berasal dari masyarakat, kelompok kepentingan, lembaga pemerintah, dan faktor-faktor

lainnya.

2. Proses (Proses):

Proses kebijakan publik melibatkan serangkaian aktivitas, diskusi, dan negosiasi antara para pemangku kepentingan. Dye mengakui bahwa proses ini tidak selalu linier dan dapat melibatkan banyak tahap dan tingkatan pemerintahan.

3. Output (Keluaran):

Output dari proses kebijakan adalah keputusan atau tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah. Ini dapat berupa peraturan, undang-undang, program, atau keputusan lainnya yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.

4. Feedback (Umpan Balik):

Dye menekankan pentingnya umpan balik dalam menganalisis kebijakan publik. Umpan balik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, media, dan kelompok kepentingan. Umpan balik ini dapat mempengaruhi evaluasi dan perubahan dalam kebijakan publik.

5. Environment (Lingkungan):

Lingkungan mencakup konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana kebijakan publik diimplementasikan. Dye menyadari bahwa lingkungan dapat berubah seiring waktu dan memiliki dampak signifikan pada kebijakan.

6. Outcome (Hasil):

Hasil kebijakan dapat diukur dalam bentuk dampak sosial, ekonomi, atau politik. Dye mengakui bahwa hasil kebijakan mungkin tidak selalu sesuai dengan niat awal dan dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.

Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan merupakan langkah berikut setelah identifikasi dan perumusan masalah. Pada taraf ini, bermacam alternatif strategi diperhitungkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang berdasarkan atas nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Perhitungan terhadap nilai-nilai ini sangat bergantung pada pendekatan yang dipakai. Ada pendekatan yang menggunakan model kelompok, teori permainan (game theory), dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan ini mempunyai penilaian yang berbeda dalam melihat hakikat dari kebijakan publik yang dengan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menetapkan kebijakan yang akan diimplementasikan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dan aktor yang bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses perumusan kebijakan publik: Pertama, Identifikasi permasalahan dalam kebijakan publik melibatkan analisis mendalam terhadap situasi atau isu tertentu

yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah contohnya seperti analisis kebutuhan masyarakat. Kedua, Perumusan agenda dengan menetapkan isu-isu yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah serta menentukan urgensi dan prioritas setiap isu. Ketiga, Analisa kebijakan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait isu-isu yang diidentifikasi serta menganalisis berbagai opsi kebijakan yang mungkin untuk menyelesaikan atau meredakan masalah tersebut. Keempat, Perumusan kebijakan dengan menyusun rencana kebijakan yang terinci berdasarkan hasil analisis serta memperhitungkan dampak potensial kebijakan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Kelima, Pengambilan keputusan dengan membuat keputusan final mengenai kebijakan yang akan diadopsi dan melibatkan pemimpin pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab. Keenam, Implementasi dengan menerapkan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait. Ketujuh, Monitoring dan evaluasi dengan memantau pelaksanaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan membuat perubahan jika diperlukan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan penerapan

rencana atau keputusan kebijakan dalam praktek. Teori-teori implementasi kebijakan publik membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan publik bersifat

dinamis dan memerlukan adaptasi terhadap situasi yang berkembang di lapangan. Setiap tahap harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan kebijakan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Proses implementasi kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah tahapan- tahapan umum dalam proses implementasi kebijakan publik: Pertama, Persiapan dan Perencanaan, tahap ini mencakup identifikasi sumber daya yang diperlukan, penetapan jadwal, dan pengembangan rencana tindakan yang rinci. Penetapan tim pelaksana, alokasi anggaran, penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur), dan pelatihan bagi pihak yang terlibat. Kedua, Pengorganisasian, tahap ini melibatkan pengaturan struktur organisasi dan mekanisme kerja untuk implementasi kebijakan. Penunjukan koordinator, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pembentukan unit-unit kerja yang relevan. Ketiga, Koordinasi, pentingnya menjaga komunikasi yang efektif dan koordinasi antara berbagai aktor dan lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Rapat koordinasi, penyebaran informasi, dan penggunaan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi. Keempat, Eksekusi atau Pelaksanaan, tahap ini

adalah inti dari proses implementasi di mana kebijakan diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Penerapan program, layanan atau tindakan sesuai kebijakan, distribusi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kelima, Pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Inspeksi lapangan, audit internal, pengumpulan data, dan penggunaan indikator kinerja untuk evaluasi. Keenam Evaluasi, tahap ini mencakup penilaian efektivitas kebijakan, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Analisis data hasil implementasi, survei kepuasan penerima manfaat, dan penyusunan laporan evaluasi.

Teori Ekonomi Pembangunan

Teori ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana negara-negara berkembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini mencakup berbagai konsep, model, dan pendekatan yang dirancang untuk memahami dan memfasilitasi proses pembangunan ekonomi di negara-negara yang kurang maju. Salah satu teori ekonomi pembangunan yaitu Teori Pertumbuhan Neo-Klasik oleh Robert Solow dan Trevor Swan 1956 (Solow-Swan Model). Teori Pertumbuhan Neo-Klasik adalah

pendekatan ekonomi yang menekankan peran akumulasi modal, teknologi, dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menekankan pentingnya pasar bekerja secara efisien untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ini merupakan evolusi dari teori pertumbuhan klasik yang menekankan pada faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal.

Dalam Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari investasi dalam modal fisik dan manusia, serta kemajuan teknologi. Teori ini menekankan pentingnya dorongan dari pasar bebas, kebijakan ekonomi yang mendukung investasi, dan inovasi dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, teori ini juga memperhatikan efisiensi alokasi sumber daya dan pengembangan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pertumbuhan modal, pertumbuhan populasi atau tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan modal merujuk pada akumulasi modal fisik, seperti mesin dan peralatan, yang digunakan dalam proses produksi. Pertumbuhan populasi atau tenaga kerja mengacu pada pertumbuhan jumlah orang yang tersedia untuk bekerja dalam ekonomi. Sedangkan kemajuan teknologi mencakup inovasi, penemuan baru, dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan peningkatan dalam ketiga faktor ini, ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam lanjutan Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, faktor-faktor tersebut saling terkait dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan modal, misalnya, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui investasi dalam peralatan dan teknologi yang lebih efisien. Kemajuan teknologi, di sisi lain, dapat mendorong pertumbuhan modal melalui inovasi dan pengembangan baru dalam produksi. Selain itu, peningkatan dalam jumlah tenaga kerja dapat mendukung akumulasi modal dan peningkatan produksi, asalkan dikelola dengan baik oleh kebijakan ekonomi yang tepat. Jadi, interaksi antara ketiga faktor ini merupakan fokus utama dalam Teori Pertumbuhan Neo-Klasik untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, Teori Pertumbuhan Neo-Klasik menyoroti pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan populasi atau tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui investasi yang tepat dalam modal fisik dan manusia, serta melalui inovasi dan pengembangan teknologi, ekonomi dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pentingnya pasar bekerja secara efisien dan kebijakan ekonomi yang mendukung investasi menjadi poin penting dalam kerangka teori ini

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian proposal ini tentunya menggunakan metode yang

sesuai dengan pokok permasalahan untuk memecahkan masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Dalam metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

Fokus Penelitian

Fokus yang sesuai dengan topik penelitian proposal ini yaitu menggunakan Teori Analisa Kebijakan Publik menurut Thomas R Dye. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Kebijakan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik yang objek utamanya merupakan para pedagang di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep.

Thomas R. Dye adalah seorang ahli ilmu politik yang terkenal dengan karyanya dalam bidang analisis kebijakan publik. Salah satu model analisis kebijakan publik yang dikembangkan oleh Thomas adalah model analisis sistem yang terdiri dari:

1. Input (Masukan):

Pada tahap ini, Thomas menekankan identifikasi dan pemahaman atas berbagai input yang mempengaruhi proses kebijakan publik. Input ini dapat berasal dari masyarakat, kelompok kepentingan, lembaga pemerintah, dan faktor-faktor lainnya.

2. Proses (Proses):

Proses kebijakan publik melibatkan serangkaian aktivitas, diskusi, dan negosiasi antara para pemangku kepentingan. Dye mengakui bahwa proses ini tidak selalu linier dan dapat melibatkan banyak tahap dan tingkatan pemerintahan.

3. Output (Keluaran):

Output dari proses kebijakan adalah keputusan atau tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah. Ini dapat berupa peraturan, undang-undang, program, atau keputusan lainnya yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.

4. Feedback (Umpan Balik):

Dye menekankan pentingnya umpan balik dalam menganalisis kebijakan publik. Umpan balik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, media, dan kelompok kepentingan.

Umpan balik ini dapat mempengaruhi evaluasi dan perubahan dalam kebijakan publik.

5. Environment (Lingkungan):

Lingkungan mencakup konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana kebijakan publik diimplementasikan. Dye menyadari bahwa lingkungan dapat berubah seiring waktu dan memiliki dampak signifikan pada kebijakan.

6. Outcome (Hasil):

Hasil kebijakan dapat diukur dalam bentuk dampak sosial, ekonomi, atau politik. Dye mengakui bahwa hasil kebijakan mungkin tidak selalu sesuai dengan niat awal dan dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang didapat benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Lokasi penelitian bertujuan supaya peneliti dapat mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap agar peneliti dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu peneliti menetapkan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Lokasi penelitian terletak di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang di kumpulkan oleh peneliti adalah ungkapan atau pernyataan yang merupakan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berasal dari rumusan masalah penelitian, maka sumber data

dalam penelitian ini adalah pedagang yang memiliki lapak sekaligus menggunakan usaha online shop, pedagang yang memiliki lapak tetapi tidak berjualan online, dan pedagang murni berjualan online.

Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri sebagai pengumpul data utama karena peneliti yang memahami secara mendalam tentang objek yang diteliti. Peneliti harus mempersiapkan daftar pertanyaan dan alat perekam untuk memperoleh data dan dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data, peneliti juga harus aktif dalam mempersiapkan pedoman penelitian yang akan dipakai. Semua itu harus dilakukan agar kendala yang ada dapat segera teratasi dan dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

Subyek Penelitian

Dalam penelitian kali ini subyek yang dituju dibagi menjadi tiga jenis informan, yakni informan utama dan informan pendukung adapun informan kunci. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling (Pengambilan informan berdasarkan tujuan), dimana orang yang ditunjuk secara sengaja oleh peneliti dan dianggap mampu mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pedagang atau UMKM yang mempunyai lapak atau toko dan sekaligus

memiliki usaha online shop di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terlibat secara langsung di lapangan dan mampu memberikan data yang lengkap mengenai Kebijakan Penutupan Aplikasi Tiktok Shop yaitu pedagang atau UMKM yang memiliki usaha online shop di Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung yaitu orang yang dapat memberikan informasi sebagai informasi pendukung secara tidak langsung orang-orang tersebut juga menilai dan merespon yaitu pedagang atau UMKM yang memiliki lapak atau toko namun tidak memiliki usaha online shop serta konsumen atau pembeli.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menguraikan mengenai teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang menggunakan semua indera untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Observasi juga merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis peristiwa dan perilaku individu. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen untuk mendapatkan data dampak penutupan Tiktok

Shop dalam mempertahankan pendapatan pedagang lokal tersebut.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah alat penelitian yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Peneliti memilih 3 orang pedagang pakaian di Pasar Tradisional Bangkal dan Toko Tingkat. Oleh karena itu peneliti menggunakan interview/wawancara sebagai prosedur alat pengumpulan data kepada pedagang pakaian di pasar tradisional untuk menggali informasi mengenai objek penelitian dengan jelas. Adapun dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan interview bebas dan terstruktur, artinya ketika melakukan wawancara, peneliti hanya menggunakan format yang telah ditentukan. Dengan teknik pengumpulan data tersebut peneliti menjadi alat utama secara fleksibel beradaptasi dengan realitas di lapangan, dan juga agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan topik pembahasan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, foto atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, yaitu seperti peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar yaitu, foto, sketsa, dll. Sedangkan Dokumen yang berbentuk benda seperti produk yang dijual. Oleh karena itu, dokumen ini melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan penunjang pada penelitian ini.

Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat

penting dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan didukung secara ilmiah

Pengecekan keabsahan data merupakan langkah untuk mengurangi kesalahan dalam data survei yang dapat mempengaruhi hasil akhir survei. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengujian data sebagai berikut :

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali kelapangan, melakukan observasi, dan mewawancarai kembali sumber data baru yang ditemui. Perpanjangan pengamatan ini, artinya hubungan peneliti dengan informan semakin dekat, saling percaya dan tidak menyembunyikan informasi karena jarak semakin dekat.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Maka dengan cara ini, keamanan data dan urutan peristiwa dicatat dengan aman dan sistematis.

c. Triagulasi

Triagulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, Sugiono memaparkan bahwa triangulasi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1) Triagulasi sumber

Triagulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Dengan kata lain,

triangulasi sumber adalah cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain.

2) Triangulasi teknik pengumpulan data
Triangulasi teknik pengumpulan data

yakni untuk menguji data agar dapat dipercaya dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

Waktu seringkali menjadi pengaruh dalam kredibilitas data. Sehingga peneliti ketika melakukan pengamatan tidak hanya satu kali saja untuk mendapatkan data yang valid. Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merujuk pada triangulasi teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dengan langkah mengecek kembali serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi di lapangan, agar peneliti mendapat data yang lengkap, serta dengan harapan data yang diperoleh layak dimanfaatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini membahas hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa kelompok pedagang terkait kebijakan penutupan Tiktok Shop. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok: pedagang yang memiliki lapak dan berjualan online, pedagang yang

memiliki lapak tetapi tidak berjualan online, dan pedagang yang murni berjualan online. Setiap kelompok memberikan perspektif unik yang membantu mengidentifikasi dampak dan implikasi dari kebijakan tersebut. Berdasarkan enam fokus penelitian yang terdiri *Input* (masukan), *Process* (proses), *Output* (keluaran), *Feedback* (umpan balik), *Environment* (lingkungan), *Outcome* (hasil) dan pembahasan yang membahas hasil wawancara sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Online Shop berhasil meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar bagi banyak pedagang, terutama mereka yang sudah berjualan online. Kehilangan platform ini berarti penurunan potensi penjualan dan perlunya penyesuaian strategi bisnis.

Online Shop menawarkan interaksi yang lebih personal dengan pelanggan melalui video pendek. Penutupan ini mengurangi kemampuan pedagang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan mereka. Pedagang yang terdampak harus segera mencari platform alternatif untuk memasarkan produk mereka. Hal ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Namun, bagi pedagang yang belum berjualan online, ini bisa menjadi motivasi untuk mulai mengadopsi teknologi dalam bisnis mereka. Penutupan platform ini menciptakan ketidakpastian bagi pedagang yang sepenuhnya bergantung pada penjualan online. Mereka harus berusaha keras untuk mempertahankan pendapatan dan pelanggan mereka di tengah perubahan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Online Shop memiliki dampak signifikan pada berbagai kelompok pedagang, terutama bagi mereka yang bergantung pada platform online untuk menjual produk. Pedagang yang sudah berjualan online merasakan penurunan penjualan dan harus mencari alternatif lain, sementara pedagang yang belum berjualan online melihat potensi untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka.

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya diversifikasi dan adaptasi dalam strategi bisnis untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga di pasar. Ketiga kategori pedagang menunjukkan dampak yang bervariasi akibat kebijakan penutupan online shop. Pedagang dengan lapak fisik memiliki keunggulan dalam diversifikasi pendapatan, sementara pedagang yang murni online menghadapi tantangan terbesar. Adaptasi yang dilakukan juga bervariasi, dengan beberapa memilih untuk mencari platform alternatif, sementara yang lain meningkatkan usaha pemasaran offline.

Pembahasan

Dalam bagian ini, pembahasan difokuskan pada analisis kebijakan penutupan TikTok Shop dengan menggunakan model analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Model ini mencakup enam komponen utama: *input* (masukan), *process* (proses), *output* (keluaran), *feedback* (umpan balik), *environment* (lingkungan), dan *outcome*

(hasil). Setiap komponen akan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang terdiri dari pedagang yang memiliki lapak dan berjualan online, pedagang yang memiliki lapak tetapi tidak berjualan online, dan pedagang yang murni berjualan online.

Komponen input dalam model Thomas R. Dye mencakup semua faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Untuk kebijakan penutupan TikTok Shop, masukan berasal dari berbagai sumber. Pihak berwenang, seperti pemerintah dan lembaga pengawas, memberikan tekanan terhadap platform media sosial yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli. Mereka mungkin merasa

perlu menutup TikTok Shop untuk melindungi kepentingan konsumen atau menjaga stabilitas ekonomi. Keluhan dari pedagang dan konsumen mengenai praktik bisnis yang tidak adil atau masalah keamanan data juga bisa menjadi faktor masukan penting. Misalnya, ada kemungkinan munculnya penipuan atau pelanggaran privasi di platform tersebut.

Data mengenai performa penjualan di Online Shop dan dampaknya terhadap pasar e-commerce lainnya juga menjadi masukan penting. Informasi ini mencakup tren penjualan, jumlah pengguna aktif, dan jenis produk yang paling laris. Selain itu, laporan dari media massa mengenai isu-isu yang terkait dengan TikTok Shop, baik positif maupun negatif, turut mempengaruhi pandangan publik dan pembuat kebijakan.

Proses dalam model analisis

kebijakan publik mencakup tahap-tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penutupan Tiktok Shop, prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Masalah diidentifikasi berdasarkan keluhan dari berbagai pihak, data penjualan, dan laporan media. Misalnya, masalah yang diidentifikasi bisa berupa adanya penipuan, pelanggaran privasi, atau dampak negatif terhadap ekonomi lokal.

b. Analisis Masalah

Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Analisis ini mungkin melibatkan studi kasus, survei, atau konsultasi dengan ahli.

c. Penyusunan Alternatif Kebijakan
Berbagai alternatif kebijakan

dirumuskan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Alternatif ini bisa termasuk pengetatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, atau penutupan total platform.

d. Evaluasi Alternatif

Setiap alternatif kebijakan dievaluasi berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya. Evaluasi ini mencakup analisis biaya-manfaat dan mempertimbangkan umpan balik dari berbagai stakeholder.

e. Pengambilan Keputusan

Setelah alternatif dievaluasi,

keputusan diambil oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, keputusan yang diambil adalah penutupan Tiktok Shop.

f. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang dipilih kemudian diimplementasikan. Proses implementasi mencakup pemberitahuan kepada pengguna, penutupan akses ke platform, dan penegakan aturan baru.

Output dari kebijakan penutupan Online Shop adalah hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan, output yang dapat diidentifikasi yaitu pengguna tidak lagi dapat mengakses Online Shop untuk melakukan transaksi jual beli. Platform tersebut secara resmi ditutup dan tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial. Pedagang dan konsumen diberi tahu tentang penutupan ini melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, email, dan pemberitahuan dalam aplikasi. Selain itu, pedagang yang sebelumnya berjualan di Tiktok Shop mulai beralih ke platform e-commerce lain seperti Shopee, Lazada, atau marketplace lainnya.

Umpan balik adalah respons yang diterima dari implementasi kebijakan. Feedback ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berdasarkan wawancara, beberapa umpan balik yang ditemukan meliputi:

Pedagang yang bergantung pada Online Shop merasa sangat kecewa dan mengalami kerugian karena kehilangan

platform penjualan utama mereka. Mereka mengungkapkan perlunya mencari alternatif lain yang setara. Konsumen juga memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka setelah penutupan. Beberapa konsumen merasa kesulitan menemukan produk yang mereka inginkan karena sudah terbiasa dengan sistem Online Shop. Pihak berwenang melakukan evaluasi terhadap dampak penutupan ini, termasuk penurunan kasus penipuan atau pelanggaran privasi yang diharapkan, serta dampak ekonomi yang terjadi.

Penutupan Tiktok
Shop

mempengaruhi lingkungan ekonomi, khususnya dalam hal persaingan usaha dan dinamika pasar e-commerce. Perubahan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal dan peluang usaha bagi UMKM. Kemajuan teknologi dan inovasi dalam e-commerce terus berkembang. Kebijakan penutupan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk mencari platform lain atau mengembangkan solusi teknologi baru. Preferensi dan perilaku konsumen dalam berbelanja online juga dipengaruhi oleh kebijakan ini. Adaptasi sosial dan budaya terhadap platform e-commerce yang berbeda menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

Salah satu hasil yang diharapkan dari kebijakan ini adalah peningkatan perlindungan terhadap UMKM dan pedagang lokal dari persaingan yang tidak

sehat dengan platform e-commerce asing. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua platform e-commerce mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Pedagang yang terdampak diharapkan dapat beradaptasi dengan mencari alternatif platform e-commerce atau mengembangkan strategi bisnis baru. Inovasi dalam cara berjualan dan pemasaran diharapkan menjadi hasil positif dari kebijakan ini. Selain itu, dampak ekonomi dari kebijakan ini dapat beragam. Sementara beberapa pedagang mungkin mengalami penurunan penjualan dalam jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pembahasan berdasarkan model analisis kebijakan publik Thomas R. Dye menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Tiktok Shop melibatkan berbagai elemen yang kompleks, mulai dari masukan yang diterima hingga hasil yang diharapkan. Setiap elemen saling terkait dan mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Dengan memahami proses dan dampak dari kebijakan ini, pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam memahami implikasi dari kebijakan penutupan Tiktok Shop dan pentingnya

adaptasi serta inovasi dalam menghadapi perubahan di pasar e-commerce.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Bab ini merangkum temuan utama dari penelitian tentang Kebijakan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan model analisis kebijakan publik Thomas R. Dye. Kesimpulan dan saran disusun dalam enam poin utama: input (masukan), process (proses), output (keluaran), feedback (umpan balik), environment (lingkungan), dan outcome (hasil). Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif untuk pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi perubahan ini.

Kebijakan Online Shop menyoroti kompleksitas dalam regulasi ekonomi digital global. Hal ini mempengaruhi dinamika pasar dan persaingan di antara platform e-commerce yang berbeda. Implikasi regulasi e-commerce menjadi perhatian utama dalam konteks globalisasi ekonomi digital. Kebijakan yang diambil oleh satu negara dapat mempengaruhi praktik bisnis internasional dan kerjasama lintas batas. Pedagang dan platform e-commerce perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perilaku konsumen. Hal ini mencakup pengembangan teknologi baru dan strategi pemasaran yang responsif.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk

membantu pedagang, konsumen, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi dampak dari kebijakan penutupan Tiktok Shop. Pedagang disarankan untuk diversifikasi platform e-commerce

yang mereka gunakan. Hal ini dapat mengurangi risiko tergantung pada satu platform saja dan membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi pedagang yang belum berjualan online, penutupan Tiktok Shop dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas digital mereka. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan platform e-commerce dapat membantu mereka memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, untuk para konsumen platform e-commerce lain yang dapat digunakan sebagai alternatif belanja perlu disosialisasikan kepada konsumen. Hal ini membantu mereka tetap terhubung dengan produk yang mereka butuhkan tanpa ketergantungan pada satu platform tertentu. Konsumen perlu diberikan informasi tentang kebijakan penutupan Tiktok Shop dan dampaknya bagi pedagang dan ekosistem bisnis. Kesadaran ini penting untuk mendukung transisi yang mulus ke platform lain.

Di sisi lain pemerintah dan regulator perlu melakukan evaluasi terhadap dampak dari kebijakan penutupan Tiktok Shop terhadap ekosistem bisnis lokal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesejahteraan konsumen. Selain itu, pemerintah juga harus melihat kejahatan dalam bertransaksi online. Berdasarkan pembelajaran dari kasus Tiktok Shop,

perluasan regulasi e-commerce yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika pasar digital menjadi penting. Hal ini juga termasuk perlindungan konsumen, perlindungan data, dan keamanan transaksi online. Kebijakan baru harus dirancang dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi inovasi dan perubahan teknologi yang cepat di sektor e-commerce. Responsivitas terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen menjadi kunci dalam mempertahankan keunggulan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik* (D. A. Halim (ed.); 4th ed.).
- Aisyah, A. P., Nurhaepi, H. D., Khaerani, N., & Kusumadinata, A. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commerce Tiktok Shop Terhadap Kepuasan Konsumen. *Karimah Tauhid*, 1(e-ISSN 2963-590X), 890–902.
- Anggraeni, M., & Sanaji, S. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kinerja Pemasaran selama Pandemi Covid-19 dengan Mediasi Kemampuan Inovasi dan Kemampuan Branding (Studi pada Pelaku UMKM yang Menggunakan Media Sosial). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 52.
<https://doi.org/10.26740/jim.v9n2.p752-767>
- Atmojo, C. T. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Commerce Sebagai Strategi Berwirausaha Pedagang Kaki Lima Di Jombang. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 07, 1–8.
<http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/2695%0Ahttp://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/download/2695/1595>
- Mafula, D. (2022). DAMPAK PENUTUPAN TIK TOK SHOP DALAM. 2(2), 36–40.
- Muslim, S., Diansah, S., Negeri, P., Nahdlatul, U., Cirebon, U., Nahdlatul, U., & Cirebon, U. (2023). *Implikasi Hukum Penutupan Tiktok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia*. 02(10), 952–963.
- Novilia, F. (2023). *SEIKO: Journal of Management & Business Evaluasi Pelaksanaan Promosi dengan Menggunakan Tiktok dan Tiktok Shop Pada Toko Baju Wanita Fabulousgrosir*. 6(1), 237–253.
- Purwantini, A. H., & Anisa, F. (2018). Analisis Penggunaan Media Sosial Bagi UKM dan Dampaknya Terhadap Kinerja. *Proceeding of The URECOL*, Vol. 9, 304–314.
<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/75/73>
- Risnawati, N. (2021). Peran Media Sosial Dimasa Pandemi untuk Kemajuan Perekonomian Di Masyarakat. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 35–46.
<https://doi.org/10.29407/jse.v4i1.56>
- Sa'adah, A. N., Rosma, A., & Aulia, D. (2022). Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 131–140.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.176>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Ulfi, N. (2022). Pengaruh e-commerce terhadap pendapatan umkm kecamatan masamba kabupaten luwu utara. ... - *Commerce Terhadap Pendapatan Umkm*
<http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/3180>